

Dr.Jamridafrizal, S.Ag., S.S., M.Hum

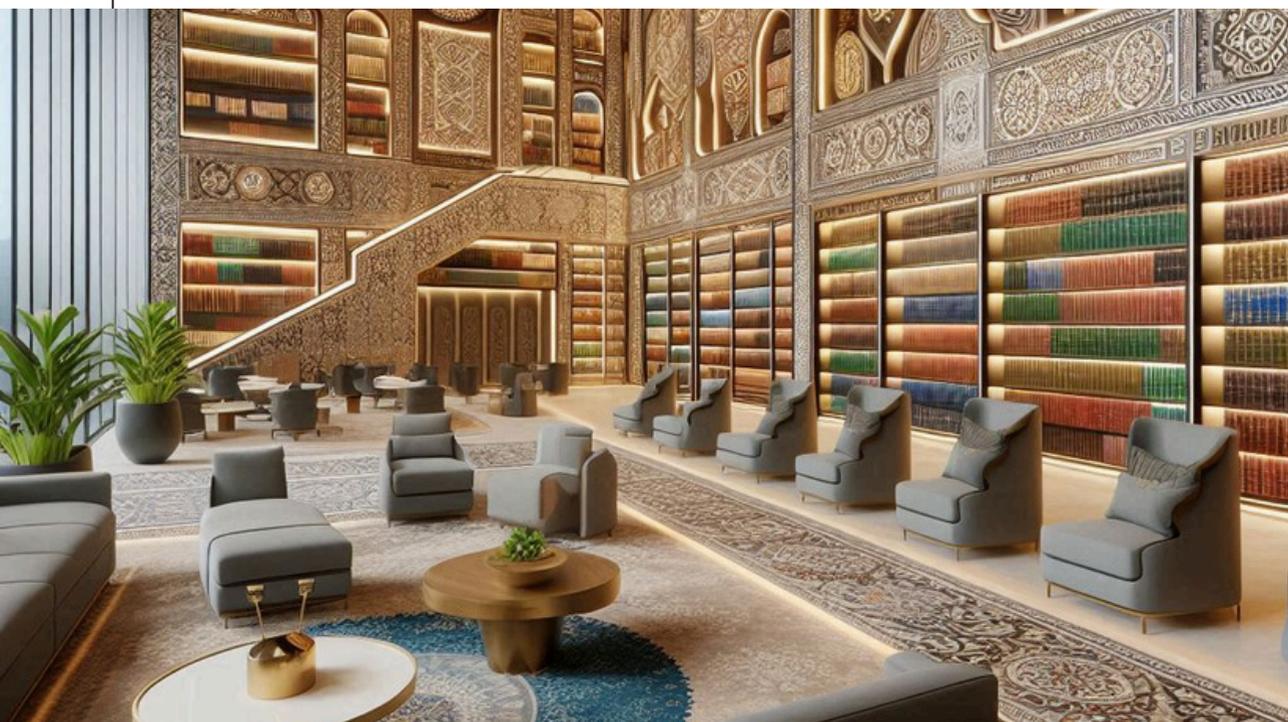
Zulfitri, S.Ag., M.A.

M. Farid Wajdi, S.Si., S.IPL., M.Hum

Editor : Andi Saputra, S.Kom., M.Kom.

PERPUSTAKAAN SEBAGAI INSTITUSI

Perspektif Organisasi dan Regulasi



PERPUSTAKAAN SEBAGAI INSTITUSI

Perspektif Organisasi dan Regulasi

Penulis :

Dr. Jamridafrizal, S.Ag., S.S., M.Hum

Zulfitri, S.Ag., M.A.

Muhammad Farid Wajdi, S.Si., S.IPI., M.Hum

Editor : Andi Saputra, S.Kom., M.Kom.



PERPUSTAKAAN SEBAGAI INSTITUSI

Perspektif Organisasi dan Regulasi

Penulis :

Dr. Jamridafrizal, S.Ag., S.S., M.Hum
Zulfitri, S.Ag., M.A.
Muhammad Farid Wajdi, S.Si., S.IPI., M.Hum

Editor : Andi Saputra, S.Kom., M.Kom.

Desain
Arielaksita

Cetakan I Juni 2024

Diterbitkan oleh
Yayasan Laksita Indonesia
Anggota IKAPI
KSB Kelapa Gading Blok AJ 23-24 Kota Serang Banten 42122
Ph : 081292652034/081284504441
<https://laksitaindonesia.site>
Email : laksitaindonesia@gmail.com

Jamridafrizal, Zulfitri, Muhammad Farid Wajdi
Perpustakaan Sebagai Institusi :
Perspektif Organisasi Dan Regulasi
Cet. 1 – Laksita Indonesia, 2024 212 hlm, 17 x 25 cm
ISBN 978-602-5749-26-1

Dilarang keras memproduksi sebagian atau seluruh isi buku ini, dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, serta menjualbelikannya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

@HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Sekapur Sirih

Bismillahirrahmanirrahim, Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, dan selawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah kebenaran. Berkat rahmat Allah, Sang Pemilik Ilmu, karya sederhana ini dapat terwujud setelah melewati masa yang tak terhitung lamanya.

Perpustakaan, sebagai institusi yang berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan akses informasi dan pengetahuan bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan bahwa perpustakaan harus dikelola secara profesional untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan berkontribusi pada pembangunan nasional.

Namun, data menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan perpustakaan di Indonesia masih belum optimal. Berdasarkan data dari Perpustakaan Nasional, jumlah kunjungan ke perpustakaan umum di Indonesia pada tahun 2020 hanya mencapai 10,4 juta orang, jauh di bawah potensi pengguna yang ada. Hal ini menunjukkan perlunya upaya serius untuk meningkatkan minat baca dan kunjungan ke perpustakaan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pemanfaatan perpustakaan adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan peran dan manfaat perpustakaan. Banyak masyarakat yang masih memandang perpustakaan sebagai tempat penyimpanan buku yang membosankan dan tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengubah citra perpustakaan menjadi tempat yang menarik, menyenangkan, dan bermanfaat bagi semua kalangan.

Selain itu, perpustakaan juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Perpustakaan harus menyediakan koleksi yang beragam dan relevan, serta layanan yang inovatif dan mudah diakses. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan perpustakaan.

Peningkatan pemanfaatan perpustakaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pengelola perpustakaan semata, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat perlu menyadari bahwa perpustakaan adalah milik mereka dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, diharapkan perpustakaan dapat menjadi pusat belajar dan pengembangan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, buku ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif tentang perpustakaan sebagai institusi yang dinamis dan adaptif dalam menghadapi tantangan era digital. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi

strategi dan praktik terbaik yang dapat diterapkan oleh perpustakaan untuk tetap relevan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan, sebagaimana pepatah Melayu mengatakan, 'Tak ada gading yang tak retak. ' Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca, baik secara tertulis maupun lisan, demi perbaikan buku ini di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pencinta ilmu perpustakaan dan informasi, serta semua pihak yang senantiasa mencari ilmu pengetahuan.

Serang, Juli 2024

Penulis



4

Jenis Perpustakaan Sebagai Institusi

Bagian ini akan membahas berbagai jenis perpustakaan yang ada di Indonesia, mulai dari perpustakaan nasional hingga perpustakaan khusus. Perpustakaan nasional akan dibahas secara mendalam, meliputi pengertian, fungsi, sejarah, dan perannya dalam mendukung pendidikan dan penelitian di tingkat nasional.

Selain itu, bagian ini juga akan menguraikan tentang perpustakaan umum, termasuk definisi, dasar hukum, misi, peran, fungsi, struktur organisasi, dan jenis layanan yang ditawarkan. Tantangan dan peluang yang dihadapi perpustakaan umum di era digital juga akan dianalisis, termasuk isu-isu seperti kesenjangan digital, literasi kesehatan, dan keterlibatan masyarakat.

Perpustakaan sekolah dan madrasah juga akan dibahas dalam bagian ini, mencakup pengertian, peran, sejarah, misi, standar, serta nilai keberadaan perpustakaan sekolah dalam mendukung proses pembelajaran. Kerjasama antara perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum juga akan dijelaskan, termasuk potensi manfaat dan tantangan yang mungkin muncul.

Bagian ini juga akan membahas Perpustakaan Perguruan Tinggi, mencakup pengertian, dasar hukum, perkembangan, prinsip-prinsip, fungsi, dan peran perpustakaan akademik dalam mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian di perguruan tinggi. Selain itu, isu-isu terkini yang dihadapi oleh pustakawan perguruan tinggi juga akan dibahas.

Terakhir, bagian ini akan menjelaskan tentang perpustakaan khusus dan pusat informasi, termasuk definisi, karakteristik, dan peran mereka dalam menyediakan informasi khusus untuk kepentingan lembaga atau organisasi tertentu. Dengan demikian, bagian ini akan memberikan gambaran komprehensif tentang berbagai jenis perpustakaan dan peran mereka dalam masyarakat.

4.1 Jenis-Jenis Perpustakaan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 20 mengklasifikasikan perpustakaan di Indonesia menjadi lima jenis yang berbeda, masing-masing dengan fungsi dan peran yang spesifik dalam masyarakat. Kelima jenis perpustakaan tersebut adalah:

1. Perpustakaan Nasional: Berperan sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang berkedudukan di ibu kota negara. Perpustakaan Nasional memiliki tugas menetapkan kebijakan nasional, melakukan pembinaan dan pengembangan, serta mengoordinasikan pengelolaan perpustakaan di seluruh Indonesia. Selain itu, Perpustakaan Nasional juga bertanggung jawab mengembangkan koleksi nasional, melestarikan budaya bangsa, dan mempromosikan minat baca masyarakat (Pasal 21).

2. Perpustakaan Umum: Dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat, perpustakaan umum bertujuan memberikan layanan perpustakaan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Perpustakaan umum daerah memiliki peran penting dalam melestarikan budaya daerah dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat (Pasal 22).
3. Perpustakaan Sekolah/Madrasah: Berada di lingkungan pendidikan, perpustakaan ini wajib memenuhi standar nasional perpustakaan dan Standar Nasional Pendidikan. Perpustakaan sekolah/madrasah menyediakan buku teks pelajaran yang memadai dan mengembangkan koleksi yang mendukung kurikulum pendidikan (Pasal 23).
4. Perpustakaan Perguruan Tinggi: Sama seperti perpustakaan sekolah/madrasah, Perpustakaan Perguruan Tinggi juga harus memenuhi standar nasional perpustakaan dan Standar Nasional Pendidikan. Koleksinya harus mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi (Pasal 24).
5. Perpustakaan Khusus: Berada di lingkungan lembaga pemerintah, swasta, atau organisasi masyarakat, perpustakaan khusus menyediakan koleksi yang relevan dengan bidang kegiatan lembaga atau organisasi tersebut. Perpustakaan ini melayani pemustaka di lingkungannya dan dapat memberikan layanan terbatas kepada pemustaka dari luar (Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27).

Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, semua jenis perpustakaan ini memiliki kesamaan mendasar dalam fungsi mereka sebagai pusat informasi dan pengetahuan. Mereka berperan penting dalam menyediakan akses informasi bagi masyarakat, mendukung pendidikan dan penelitian, serta melestarikan budaya bangsa. Selain itu, pengelolaan perpustakaan, baik perpustakaan umum, sekolah/madrasah, perguruan tinggi, maupun perpustakaan khusus, harus sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk memastikan kualitas layanan yang optimal (Pasal 18).

4.2 Gambaran Umum Perpustakaan di Indonesia

Data sensus Perpustakaan Nasional tahun 2018 mencatat total 164. 610 perpustakaan di Indonesia. Sebagian besar, yaitu 113. 541 unit, merupakan perpustakaan sekolah/madrasah. Kemudian, terdapat 6. 552 perpustakaan khusus dan 2. 057 Perpustakaan Perguruan Tinggi(h. 5)⁸³. Berikut penulsi memvisualisasikan data tersebut kedalam tabel di bawah ini:

Tabel. 1. Jumlah Perpustakaan 2018

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah
1	Perguruan Tinggi	2,057
2	Khusus	6,552

⁸³ Nasional, P. (2020). Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024. *no. Agustus, 2020.*

3	Umum	42,460
4	Sekolah/Madrasah	113,541
	Jumlah	164,610

(sumber: Rencana Strategis Perpustakaan Nasional RI Tahun 2020-2024)

Data terbaru dari data. perpustakaan.go.id pada Mei 2023 menunjukkan perubahan signifikan dalam lanskap perpustakaan di Indonesia dibandingkan dengan data sensus tahun 2018. Terdapat penurunan jumlah perpustakaan khusus, dari 6.552 unit menjadi 3.191 unit. Namun, hal ini diimbangi dengan peningkatan jumlah perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi, masing-masing bertambah sebanyak 27.102 unit dan 932 unit.

Selain itu, data Mei tahun 2023 juga memasukkan beberapa kategori perpustakaan umum yang tidak ada pada data sensus 2018, seperti perpustakaan umum kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, komunitas/TBM, dan provinsi. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan dan diversifikasi jenis perpustakaan umum yang tersedia bagi masyarakat. Berikut ini penulis memvisualisasikan dalam bentuk tabel di bawah ini

Tabel. 2 Jumlah Perpustakaan secara Nasional bulai Mei tahun 2023

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah
1	Perpustakaan Khusus	3,191
2	Perpustakaan Perguruan Tinggi	2,989
3	Perpustakaan Sekolah	140,643
4	Perpustakaan Umum Kab/Kota	539
5	Perpustakaan Umum Kecamatan	516
6	Perpustakaan Umum Kelurahan	9,637
7	Perpustakaan Umum Komunitas/TBM dll	1,980
8	Perpustakaan Umum Provinsi	39
	Jumlah	159,534

(Sumber: data. perpustakaan.go.id, Mei, 2023, dimodifikasi)⁸⁴

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 5 tahun. Jumlah perpustakaan khusus mengalami penurunan sebesar 51%, sementara perpustakaan sekolah/madrasah justru meningkat sebesar 24%. Peningkatan juga terjadi pada jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi sebesar 45%. Data tahun 2023 juga menunjukkan adanya perkembangan signifikan pada perpustakaan umum. Pada tahun 2018, data perpustakaan umum belum diklasifikasikan lebih lanjut. Namun, pada tahun 2023,

⁸⁴ <https://data.perpustakaan.go.id/public/direktori>, diakses, 14-5-2023

terdapat 9.637 perpustakaan umum kelurahan, menunjukkan adanya perluasan akses perpustakaan hingga tingkat kelurahan.

Secara keseluruhan, jumlah perpustakaan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 3% dari tahun 2018 hingga akhir 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan jumlah perpustakaan khusus. Meskipun demikian, perkembangan positif terlihat pada peningkatan jumlah perpustakaan sekolah/madrasah, perguruan tinggi, dan perluasan jenis perpustakaan umum

4.3 Perpustakaan Nasional RI

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang memiliki peran sentral dalam pengembangan perpustakaan di Indonesia. Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 mengamanatkan Perpusnas RI untuk melaksanakan berbagai tugas dan fungsi penting, termasuk pengembangan standar nasional perpustakaan, pengelolaan koleksi nasional, dan pembinaan perpustakaan di seluruh Indonesia.

4.3.1 Pengertian Dan Fungsi Utama

UU No. 43 Tahun 2007, khususnya Pasal 1 angka 5, mendefinisikan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) sebagai lembaga pemerintah non-departemen (LPND) yang memiliki enam fungsi utama. Keenam fungsi ini mencakup peran Perpusnas RI sebagai Perpustakaan Pembina, Perpustakaan Rujukan, Perpustakaan Deposit, Perpustakaan Penelitian, Perpustakaan Pelestarian, dan Pusat Jejaring Perpustakaan.

Pasal 21 undang-undang yang sama menguraikan tugas-tugas utama Perpusnas RI, antara lain menetapkan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan pengembangan, membina kerja sama, serta mengembangkan standar nasional perpustakaan. Selain itu, Perpusnas RI juga bertanggung jawab mengembangkan koleksi nasional, melestarikan warisan budaya, mempromosikan perpustakaan dan minat baca, serta mengupayakan pengembalian naskah-naskah kuno dari luar negeri.

4.3.2 Sejarah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Sejarah Perpusnas RI merupakan perjalanan panjang yang dimulai sejak era kolonial Belanda. Berdasarkan kajian Basuki (2008), sejarah Perpusnas RI dapat dilihat dari berbagai perspektif, mulai dari penerus gerakan pencerahan internasional, institusi kolonial, produk era pasca-Perang Dunia II, hasil pengaruh UNESCO, hingga representasi tantangan adaptasi perencanaan terhadap realitas lokal.⁸⁵

⁸⁵ Basuki, S. (2008). Sejarah Perpustakaan Nasional RI: Sebuah Kajian. *Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*, 151, 10-17.

Sejarah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berakar dari era kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1778. Pada masa itu, seorang tokoh terkemuka di Batavia bernama J. -C. M. Radermacher mendirikan Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, sebuah lembaga yang menjadi cikal bakal perpustakaan nasional (Stam, D. H. ,2001,hal. 520)⁸⁶. Lembaga ini didirikan dengan tujuan mulia, yaitu menjadi pusat pembelajaran dan penelitian di Hindia Belanda, mengikuti jejak lembaga-lembaga serupa di Eropa pada masa Pencerahan. Renier de Klerk, gubernur Batavia saat itu, turut mendukung inisiatif ini dengan menjadi presiden pertama lembaga tersebut. (Raat, A. J. (2010. hal. 650)⁸⁷

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen memainkan peran penting dalam perkembangan intelektual dan budaya di Hindia Belanda. Lembaga ini menerbitkan jurnal ilmiah bernama *Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap* (VBG) yang berisi berbagai penelitian tentang ilmu pengetahuan, seni, dan budaya di wilayah tersebut. Selain itu, lembaga ini juga memiliki koleksi museum dan perpustakaan yang kaya akan sumber daya pengetahuan(Cœdès,G. ,1913)⁸⁸. F. Baron von Wurmb, seorang naturalis terkemuka, berperan sebagai pustakawan dan kurator kabinet sejarah alam, mengawasi dan mengembangkan koleksi-koleksi berharga ini(Kalkman, C. , & Smit, P,1979)⁸⁹.

Namun, perjalanan lembaga ini tidak selalu mulus. Seiring dengan perubahan politik dan sosial di Hindia Belanda, lembaga ini mengalami pasang surut. Pada tahun 1811, ketika Inggris menguasai Jawa, Sir Stamford Raffles, seorang letnan gubernur Inggris yang visioner, menghidupkan kembali lembaga ini yang sempat mengalami kemunduran. Raffles memperkenalkan konstitusi baru yang terinspirasi oleh Asiatic Society of Bengal, memberikan arah baru bagi perkembangan lembaga ini dengan fokus yang lebih kuat pada penelitian dan pengkajian budaya Timur(Raffles, L. S,1830)⁹⁰

⁸⁶ Stam, D. H. (2001). *International dictionary of library histories*. Routledge.

⁸⁷ Raat, A. J. (2010). *The life of governor Joan Gideon Loten (1710-1789): a personal history of a Dutch virtuoso*. Uitgeverij Verloren.

⁸⁸ Cœdès, G. (1913). Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen: Dr. NJ Krom: *Verhandelingen*, deel IX: Oud-javaansche Oorkonden nagelaten transcripties van wijlen; Dr. JA Brandes: *Rapporten van de commissie in Nederlansch-Indië voor oudheidkundig onderzoek op Java en Madoera, 1912*; *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde*, deel IV, 1913. *Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient*, 13(1), 22-22.

⁸⁹ Kalkman, C., & Smit, P. (1979). *Rijksherbarium 1829-1979. Blumea: Biodiversity, Evolution and Biogeography of Plants*, 25, 1-140.

⁹⁰ Raffles, L. S. (1830). *Memoir of the Life and Public Services of Sir Thomas Stamford Raffles, FRS &c: Particularly in the Government of Java, 1811-1816, and of Bencoolen and Its Dependencies, 1817-1824: with Details of the Commerce and Resources of the Eastern Archipelago, and Selections from His Correspondence*. J. Murray.

Selama periode ini, kontribusi Thomas Horsfield, seorang ahli bedah Amerika, sangatlah penting. Ia melakukan penelitian ekstensif tentang flora dan fauna di Jawa, menghasilkan karya-karya ilmiah yang berharga. Kontribusinya memperkaya khazanah pengetahuan tentang alam Hindia Belanda dan memperkuat reputasi lembaga ini sebagai pusat penelitian ilmiah (Van Niel, E. S. (1980)⁹¹

Pada pertengahan abad ke-19, kepemimpinan Dr. W. R. van Hoevell sebagai presiden lembaga (1842-1848) membawa perubahan yang signifikan. Ia menetapkan prioritas baru, memusatkan upaya pada pengembangan koleksi, dan memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat informasi dan pengetahuan. Pada masa ini, lembaga ini mulai membuka pintu bagi partisipasi masyarakat lokal. (Effert, R. A. H. D. (2008)⁹². Beberapa tokoh terkemuka Jawa, termasuk Raden Saleh, seorang pelukis ternama, bergabung dengan lembaga ini, menandai babak baru dalam sejarah perkembangan intelektual di Hindia Belanda⁹³.

Menjelang abad ke-20, perpustakaan ini semakin berkembang dan diakui secara internasional. Koleksinya semakin kaya dengan karya-karya tentang berbagai disiplin ilmu, termasuk filologi, agama, hukum, etnografi, geografi, dan sejarah. Koleksi manuskrip Jawa, Melayu, dan Arab yang langka dan berharga menjadi daya tarik bagi para peneliti dan cendekiawan dari seluruh dunia.⁹⁴

Meskipun demikian, perpustakaan ini tidak luput dari kritik. Pada tahun 1858, J. A. C. Oudemans, seorang astronom, menyoroti kondisi fisik perpustakaan yang kurang memadai dan pengelolaan yang perlu ditingkatkan (Pyenson, L. (1989).)⁹⁵. Pada tahun 1909, pustakawan Ph. S. van Ronkel juga menyoroti masalah serupa, terutama mengenai belum adanya katalog publik yang memudahkan akses ke koleksi perpustakaan yang kaya dan beragam. (Wright, A. (Ed., 1909).⁹⁶

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, perpustakaan ini memasuki babak baru dalam sejarahnya. Tingkat estafet kepemimpinan perpustakaan beralih ke tangan Mastini Hardjoprakoso. Beliau adalah seorang tokoh yang visioner dan berdedikasi tinggi terhadap pengembangan perpustakaan di Indonesia. Mastini memainkan peran krusial dalam perencanaan dan pembentukan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Visi dan kepemimpinannya berhasil mengubah

⁹¹ Van Niel, E. S. (1980). *The Batavian Society and Scholarship in the Dutch East Indies, 1778-1850* (Doctoral dissertation, University of Hawaii at Manoa).

⁹² Effert, R. A. H. D. (2008). *Royal cabinets and auxiliary branches: origins of the National Museum of Ethnology, 1816-1883* (No. 159). CNWS Publications.

⁹³ Massil, S. W. (1989). The history of the National Library of Indonesia: the bibliographical Borobudur. *Libraries & culture*, 475-488.

⁹⁴ Spaulding, B. J. (1972). *The development of libraries in Indonesia* (Doctoral dissertation, The University of Chicago).

⁹⁵ Pyenson, L. (1989). *Empire of reason: exact sciences in Indonesia, 1840-1940* (Vol. 13). Brill..

⁹⁶ Wright, A. (Ed.). (1909). *Twentieth Century Impressions of Netherlands India: Its History, People, Commerce, Industries and Resources*. Lloyd's Greater Britain Publishing Company.

lembaga kolonial ini menjadi perpustakaan nasional yang modern dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

4.3.3 Pendirian Perpustakaan Nasional Indonesia

Gagasan pembentukan perpustakaan nasional muncul pada tahun 1961, namun baru terealisasi pada tahun 1980. Mastini Hardjoprakoso (1973, 1984), direktur Perpustakaan Nasional saat itu, berperan penting dalam menyusun rencana pembentukan perpustakaan nasional setelah menyelesaikan studinya di luar negeri. Rencana ini mendapat perhatian dari Badan Perencanaan Nasional (BAPENNAS) dan lembaga ilmiah lainnya (Hardjoprakosa, Mastini (1973))⁹⁷

Minat dan dukungan Ibu Tien Suharto, istri Presiden Indonesia, terhadap pameran perpustakaan, serta adanya undang-undang tahun 1980, berperan penting dalam pembukaan perpustakaan dan gedung baru pada tahun 1988. Perencanaan perpustakaan melibatkan upaya internal dan konsultan yang luas, dengan laporan awal dibahas oleh P. W. T. Poon pada tahun 1975 (A. G. W. Dunningham dan R. Patah, 1953)⁹⁸.

Peresmian gedung baru Perpustakaan Nasional pada tahun 1980, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no. 0164/0/1980, juga menandai penggabungan empat organisasi yang sudah ada, yaitu Perpustakaan Museum Nasional, dua departemen dari Pusat Pengembangan Perpustakaan, dan perpustakaan kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Penggabungan ini mengintegrasikan koleksi lebih dari 500.000 judul dan menjadikan Perpustakaan Nasional Indonesia sebagai lembaga sentral yang menyimpan dan mengelola koleksi perpustakaan yang beragam.⁹⁹

Meskipun memiliki peran dasar yang luas, dalam praktiknya, Perpustakaan Nasional terutama merupakan perpustakaan humaniora. Tanggung jawab nasional untuk ilmu pengetahuan berada di bawah Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah

⁹⁷ Hardjoprakosa, Mastini (1973). Pentingnya perpustakaan nasional bagi Indonesia. Jakarta : Perpustakaan Museum Pusat

⁹⁸ A. G. W. Dunningham dan R. Patah, Laporan tentang Survei dan Rekomendasi untuk Pendirian Layanan Perpustakaan Nasional di Indonesia (Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada, 1953); A. G. W. Dunningham, Perkembangan Perpustakaan di Indonesia (Paris: UNESCO, 1964, WS/1163.118.BMS); H. Bryan, Laporan tentang Pengembangan Layanan Dokumentasi dan Informasi Nasional di Indonesia," Him punan Pustakawan Khusus Indonesia Majalah no. 1 (1972): Supp. hal. 1-39; P. Ward, Indonesia: Perkembangan Layanan Perpustakaan Nasional (Paris: Unesco, 1975); Selo Soemardjan, Laporan dan rekomendasi tentang sistem nasional perpustakaan dan perpustakaan nasional Indonesia (Jakarta: Museum Nasional, 1977); G. Thompson, "Brief for the Architectural Competition for the National Library of Indonesia," 1982; dan P. W. T. Poon, "A Proposed National Library System in Indonesia," Australian Academic & Research Libraries 6 (1975): 20-30.

⁹⁹ Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, no. 0164/0/1980, tentang Perpustakaan Nasional, 17 Mei 1980

(PDII, 1965); untuk pertanian, Perpustakaan Pusat Ilmu Hayati dan Pertanian (dulu "Bogoriensis" tahun 1842); dan untuk kedokteran, perpustakaan fakultas kedokteran Universitas Indonesia. Bibliografi Nasional dan Indeks Majalah (diproduksi oleh PDII) dijelaskan dalam karya Gorman (G. E. Gorman)¹⁰⁰.

Dalam UU No. 43 Tahun 2007, khususnya Pasal 1 angka 5, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) didefinisikan sebagai lembaga pemerintah non-departemen (LPND) yang memiliki enam fungsi utama:

1. Perpustakaan Pembina: Perpusnas RI berperan dalam membina dan mengembangkan perpustakaan di seluruh Indonesia, termasuk menyusun standar dan pedoman pengelolaan perpustakaan.
2. Perpustakaan Rujukan: Perpusnas RI menyediakan layanan referensi dan informasi yang komprehensif bagi masyarakat, lembaga pemerintah, maupun swasta.
3. Perpustakaan Deposit: Perpusnas RI menerima salinan karya cetak dan rekam terbitan di Indonesia sebagai upaya pelestarian dan pendokumentasian kekayaan intelektual bangsa.
4. Perpustakaan Penelitian: Perpusnas RI menyediakan koleksi dan layanan khusus untuk mendukung kegiatan penelitian di berbagai bidang ilmu pengetahuan.
5. Perpustakaan Pelestarian: Perpusnas RI bertanggung jawab melestarikan bahan pustaka langka dan bersejarah sebagai bagian dari warisan budaya bangsa.
6. Pusat Jejaring Perpustakaan: Perpusnas RI berperan sebagai koordinator dan fasilitator jejaring perpustakaan di seluruh Indonesia, termasuk pertukaran informasi dan sumber daya antarperpustakaan.

Pasal 21 UU No. 43 Tahun 2007 menguraikan tugas-tugas utama Perpusnas RI, yaitu:

1. Menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis terkait pengelolaan perpustakaan.
2. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan.
3. Membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.
4. Mengembangkan standar nasional dalam hal perpustakaan.

Selain tugas-tugas tersebut, Perpusnas RI juga bertanggung jawab untuk:

1. Mengembangkan koleksi nasional yang mendukung terciptanya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
2. Mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan warisan budaya bangsa.
3. Melakukan promosi perpustakaan dan mendorong minat baca guna mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

¹⁰⁰ Gorman, G. E., & Mahoney, M. M. (1983). Guide to current national bibliographies in the Third World. (*No Title*).

4. Mengidentifikasi dan berupaya mengembalikan naskah-naskah kuno yang berada di luar negeri.

4. 4. Perpustakaan Umum

Perpustakaan umum adalah pilar penting dalam masyarakat, menyediakan akses informasi dan sumber daya bagi semua kalangan tanpa memandang usia, latar belakang, atau status sosial ekonomi. Keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014, yang mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin ketersediaan dan pengembangan perpustakaan umum di seluruh wilayah Indonesia

4.4.1 Definisi Perpustakaan Umum

Definisi perpustakaan umum telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, mencerminkan perubahan peran dan fungsinya dalam masyarakat. Pada tahun 1994, *IFLA/UNESCO Public Library Manifesto* mendefinisikan perpustakaan umum sebagai pusat informasi lokal yang menyediakan segala jenis pengetahuan dan informasi bagi penggunanya.¹⁰¹ Definisi ini menekankan peran perpustakaan sebagai penyedia akses informasi bagi masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, definisi perpustakaan umum semakin berkembang. *IFLA Public Library Service Guidelines* (2010) memperluas definisi ini dengan menyatakan bahwa perpustakaan umum adalah komponen penting dalam masyarakat pengetahuan. Perpustakaan umum tidak hanya menyediakan akses informasi, tetapi juga memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat, mendukung kreativitas, dan mendorong keterlibatan masyarakat.¹⁰²

Selain itu, pedoman tersebut juga menekankan peran perpustakaan umum sebagai agen perubahan sosial. Perpustakaan umum diharapkan dapat secara proaktif menjangkau masyarakat, memahami kebutuhan mereka, dan merancang layanan yang relevan. Dengan demikian, perpustakaan umum berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Definisi lain yang lebih spesifik mengenai perpustakaan umum diberikan oleh *CPLA Program Standards*. Standar ini mendefinisikan perpustakaan umum sebagai entitas yang didirikan berdasarkan undang-undang atau peraturan negara bagian untuk melayani komunitas, distrik, atau wilayah tertentu. Perpustakaan umum harus menyediakan koleksi bahan cetak atau non-cetak, staf yang dibayar, jadwal layanan, fasilitas pendukung, dan didanai sebagian atau seluruhnya oleh publik.¹⁰³

¹⁰¹ IFLA, U. (1994). *Public Library Manifesto. 2015-12-20*. <http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman.html>.

¹⁰² Koontz, C., & Gubbin, B. (Eds.). (2010). *IFLA public library service guidelines* (Vol. 147). Walter de Gruyter.

¹⁰³ <https://ala-apa.org/certification/application/definition-of-a-public-library/>

Secara keseluruhan, definisi perpustakaan umum telah berkembang dari sekadar penyedia akses informasi menjadi lembaga yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat, pembelajaran sepanjang hayat, dan pembangunan sosial. Perpustakaan umum diharapkan dapat terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi untuk tetap relevan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

4.4.2 Dasar hukum Perpustakaan Umum

Dasar hukum perpustakaan umum di Indonesia tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. UUD 1945 menjadi landasan konstitusional dengan menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan (Pasal 31 ayat 1) dan kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional (Pasal 32 ayat 1).

Lebih lanjut, UU No. 43 Tahun 2007 menjadi dasar hukum utama yang mengatur penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia. Undang-undang ini mendefinisikan perpustakaan umum (Pasal 1 ayat 6), mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta pemerintah dalam penyelenggaraan perpustakaan (Pasal 6 dan 7), serta merinci berbagai jenis perpustakaan, termasuk perpustakaan umum (Pasal 20 dan 22). Selain itu, UU No 43 Tahun 2007 juga mendorong pembudayaan kegemaran membaca melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum (Pasal 48 ayat 4).

PP No. 24 Tahun 2014 merupakan peraturan pelaksana yang lebih detail dari UU No 43 Tahun 2007. Peraturan Pemerintah ini mengatur standar nasional perpustakaan (Pasal 9-18), standar pelayanan perpustakaan (Pasal 23-30), standar tenaga perpustakaan (Pasal 31-40), standar penyelenggaraan (Pasal 41-42), dan standar pengelolaan perpustakaan (Pasal 43-47). PP Perpustakaan juga mengatur kewajiban penyelenggara perpustakaan, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta sanksi administratif yang dapat dikenakan jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi (Pasal 77-88).

Selain peraturan perundang-undangan nasional, dasar hukum perpustakaan umum di Indonesia juga diperkuat oleh standar dan prinsip internasional. IFLA/UNESCO Public Library Manifesto (1994) menekankan peran penting perpustakaan umum sebagai pusat informasi dan bagian integral dari masyarakat demokratis. Manifesto ini juga menegaskan prinsip kesetaraan akses bagi semua pengguna perpustakaan, tanpa diskriminasi.

Prinsip-prinsip dalam Manifesto tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam *IFLA Public Library Service Guidelines* (2010). Pedoman ini memberikan panduan komprehensif tentang layanan perpustakaan umum yang berkualitas, termasuk koleksi, staf, fasilitas, dan program. Pedoman ini mendorong perpustakaan umum untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, serta berperan aktif dalam pembangunan sosial dan peningkatan kualitas hidup

4.4.3 Misi Perpustakaan Umum

UU No. 43 Tahun 2007 mengamanatkan perpustakaan umum sebagai institusi inklusif yang menyediakan sarana pembelajaran sepanjang hayat bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Pasal 4 undang-undang tersebut menggarisbawahi tujuan utama perpustakaan, yaitu "memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa".

Misi utama Perpustakaan Umum menurut IFLA (2022) adalah menyediakan akses informasi dan ide, mengembangkan kreativitas pribadi, membangun kebiasaan membaca, mendukung literasi, menyediakan layanan secara langsung dan jarak jauh, memastikan akses informasi komunitas, menyediakan akses ke pengetahuan ilmiah, melayani perusahaan dan kelompok kepentingan lokal, melestarikan data dan pengetahuan lokal, mendorong dialog antarbudaya, dan melestarikan warisan budaya¹⁰⁴. Misi ini selaras dengan tujuan perpustakaan dalam UU No. 43 Tahun 2007 dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Selain layanan dasar, perpustakaan umum juga menyediakan layanan responsif seperti akses internet, pelatihan, e-book, kegiatan anak-anak, diskusi buku, dan akses ke koleksi khusus. Untuk memahami lebih lanjut mengenai aktivitas dan strategi perpustakaan dalam meningkatkan minat baca dan era kecerdasan artifisial, diperlukan survei komprehensif terhadap berbagai jenis perpustakaan. (PNRI, 2023)¹⁰⁵

Pasal 22 (1) UU No. 43 Tahun 2007 mengatur bahwa perpustakaan umum dapat diselenggarakan oleh berbagai entitas, mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat. Data dari perpusnas.go.id menunjukkan bahwa terdapat 12.711 perpustakaan umum di Indonesia, dengan perpustakaan umum kelurahan sebagai yang terbanyak. (data.perpusnas.go.id)¹⁰⁶

Perpustakaan umum merumuskan misi, tujuan, dan sasaran melalui perencanaan jangka panjang yang melibatkan partisipasi masyarakat. Namun, pergeseran paradigma menuju respons yang lebih adaptif terhadap kebutuhan yang berkembang telah mengurangi penekanan pada perencanaan jangka panjang. Visi perpustakaan umum provinsi di Indonesia beragam, memunculkan pertanyaan mengenai keselarasannya dengan visi provinsi masing-masing dan visi Perpustakaan Nasional RI.

Weinberger (2016) mencatat bahwa misi perpustakaan di masa depan mungkin akan bertransformasi menjadi "pusat komunitas" (hal. 266)¹⁰⁷. Pandangan ini sejalan dengan observasi Field dan Tran (2018) yang menyatakan bahwa

¹⁰⁴ Krass, U., Allen, M., White, E., Cybelle Ferrari, A., Brigant, A., Prucková, L., ... & McGuire, C. (2022). The IFLA-UNESCO Public Library Manifesto 2022.

¹⁰⁵PNRI. (2023). Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

¹⁰⁶ <https://data.perpusnas.go.id/public/direktori>, diakses, 14-5-2023

¹⁰⁷ Weinberger, D. (2016). The Library as Center of Meaning. *Public Library Quarterly*, 35, 264-266.

perpustakaan harus memikirkan kembali tujuan mereka dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks tumbuhnya gerakan keadilan sosial, perpustakaan umum telah menjadi arena perdebatan mengenai batasan partisipasi politik. Meskipun misi perpustakaan umum secara tradisional menghindari keberpihakan politik eksplisit, keterlibatan mereka dalam isu-isu sosial dan penyediaan layanan yang memfasilitasi partisipasi politik menegaskan karakter inheren mereka sebagai entitas politik (Barniskis, 2016)¹⁰⁸

Pimpinan perpustakaan harus mampu menjalin hubungan yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan dan terlibat dalam kegiatan advokasi untuk memperjuangkan kepentingan perpustakaan. Perpustakaan umum dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan peran mereka sebagai lembaga netral dengan tanggung jawab mereka untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

4.4.4 Peran dan fungsi Perpustakaan Umum

Peran dan fungsi perpustakaan umum di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 . dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014. UU No 43 Tahun 2007 Pasal 4 menggarisbawahi peran perpustakaan umum dalam "memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. " Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan umum tidak hanya berfungsi sebagai penyedia koleksi, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat yang berperan aktif dalam pengembangan masyarakat.

Perpustakaan umum diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka, seperti yang tercantum dalam Pasal 14 UU No 43 Tahun 2007. Ini mencakup penyediaan akses ke berbagai sumber informasi, baik cetak maupun digital, serta layanan referensi dan bimbingan dalam pencarian informasi. Selain itu, perpustakaan umum juga berperan sebagai fasilitator dalam meningkatkan literasi masyarakat, khususnya literasi baca-tulis, sesuai dengan amanat Pasal 48 ayat (4) UU No 43 Tahun 2007 .

Peran perpustakaan umum juga diperkuat oleh *IFLA/UNESCO Public Library Manifesto* (1994, 2022) dan *IFLA Public Library Service Guidelines*. Manifesto ini menekankan peran penting perpustakaan umum sebagai pusat informasi dan pembelajaran sepanjang hayat di tingkat lokal, yang menyediakan akses setara bagi semua orang tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, atau ekonomi. Perpustakaan umum juga memiliki misi dalam mendukung pendidikan, menyediakan informasi, mengembangkan kreativitas individu, melestarikan budaya, dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat.

¹⁰⁸ Barniskis, S. C. (2016). Deconstructing the Mission: A Critical Content Analysis of Public Library Mission Statements. *Library Quarterly*, 86, 135-152.

IFLA Public Library Service Guidelines (2010) lebih lanjut merinci layanan yang harus disediakan oleh perpustakaan umum, termasuk peminjaman buku dan materi lainnya, layanan informasi dan referensi, program dan kegiatan literasi, akses ke teknologi dan internet, serta layanan khusus untuk kelompok-kelompok tertentu seperti anak-anak, remaja, orang tua, dan penyandang disabilitas.

Dengan demikian, perpustakaan umum di Indonesia memiliki peran yang luas dan beragam. Selain menyediakan akses ke informasi dan pengetahuan, perpustakaan umum juga berperan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat, pendorong literasi, fasilitator pengembangan masyarakat, dan pelestari budaya. Semua peran ini saling terkait dan berkontribusi pada tujuan utama perpustakaan umum, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

4.4.5 Struktur perpustakaan umum

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum (SNP Umum No. 2 Tahun 2024) menjadi landasan krusial dalam transformasi perpustakaan umum di Indonesia. Standar ini tidak hanya mengatur aspek teknis dan administratif, namun juga menekankan pentingnya struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang optimal.

Keberadaan struktur organisasi yang jelas, diperkuat dengan deskripsi tugas terperinci untuk setiap bagian atau unit kerja, memastikan setiap individu memahami peran dan tanggung jawabnya. Pemahaman ini pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Standar ini mengklasifikasikan perpustakaan umum menjadi empat tingkatan berdasarkan wilayah administratif, yaitu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Setiap tingkatan memiliki struktur organisasi minimal yang terdiri dari kepala perpustakaan, bagian pelayanan teknis, dan bagian pelayanan pemustaka dan TIK. Khusus pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, terdapat tambahan bagian administrasi.

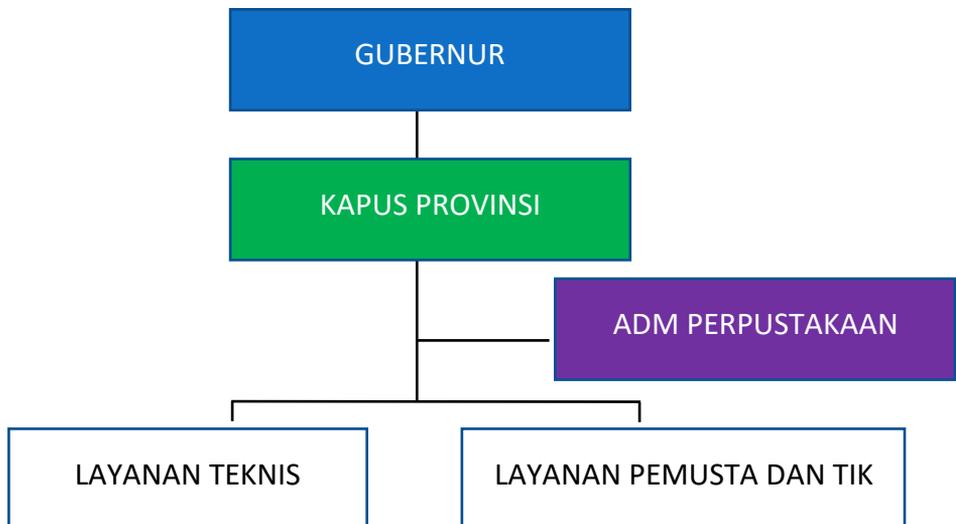
Lebih lanjut, SNP Umum No. 2 Tahun 2024 juga mendorong pemanfaatan TIK dalam pengelolaan perpustakaan. Dalam era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam layanan perpustakaan. Oleh karena itu, standar ini mendorong integrasi TIK dalam berbagai aspek operasional perpustakaan, mulai dari pengelolaan koleksi, pelayanan pemustaka, hingga pengembangan perpustakaan secara keseluruhan. Dengan demikian, bagian pelayanan pemustaka dan TIK menjadi salah satu bagian krusial dalam struktur organisasi perpustakaan umum di Indonesia.

Berikut adalah struktur organisasi perpustakaan umum di Indonesia berdasarkan tingkatannya sebagaimana diatur dalam SNP Umum No. 2 Tahun 2024

1. Struktur Perpustakaan Provinsi:

- 1) Bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
- 2) Struktur organisasi minimal terdiri dari kepala perpustakaan, bagian pelayanan teknis, bagian pelayanan pemustaka dan teknologi informasi dan

komunikasi (TIK), serta bagian administrasi. Struktur organisasi ini dapat



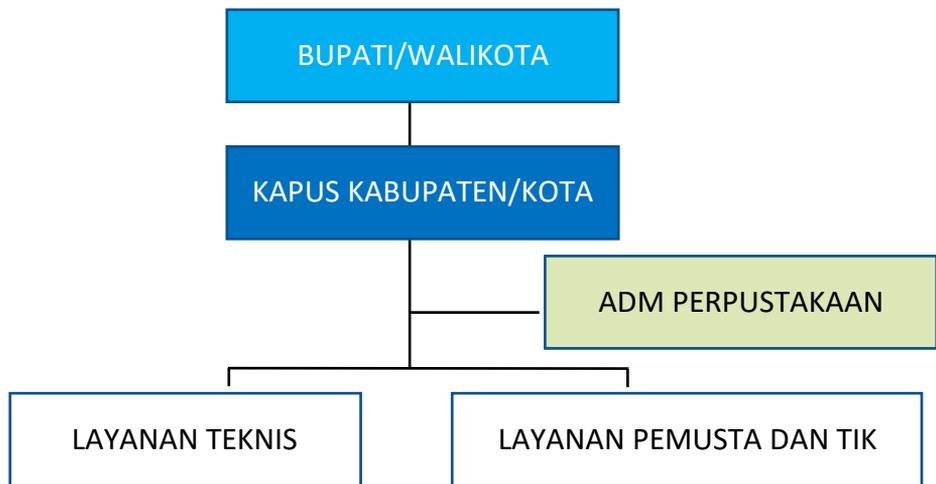
dilihat pada Gambar 1 berikut ini

Gambar. 1. Struktur Organisasi Perpustakaan Provinsi

2. Struktur Perpustakaan Kabupaten/Kota:

- 1) Bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota.
- 2) Struktur organisasi minimal serupa dengan Perpustakaan Provinsi, terdiri dari kepala perpustakaan, bagian pelayanan teknis, bagian pelayanan pemustaka dan TIK, dan bagian administrasi. Gambar 2 berikut memberikan ilustrasi struktur organisasi ini.

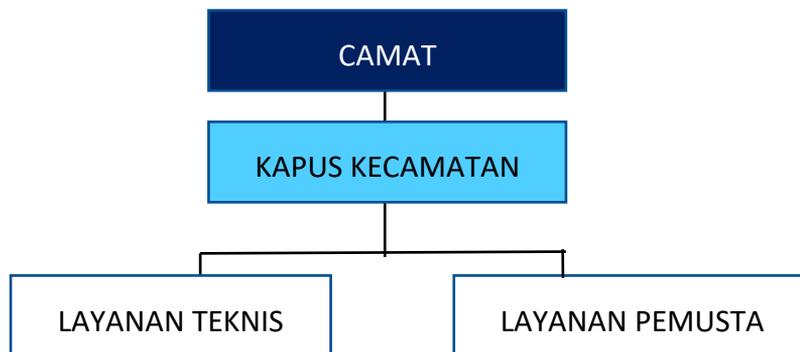
Gambar 2. Struktur Organisasi Perpustakaan Kabupaten/Kota



3. Struktur Perpustakaan Kecamatan:

- 1) Bertanggung jawab langsung kepada Camat.
- 2) Struktur organisasi minimal terdiri dari kepala perpustakaan, bagian pelayanan teknis, dan bagian pelayanan pemustaka dan TIK. struktur ini dapat dilihat pada Gambar 3

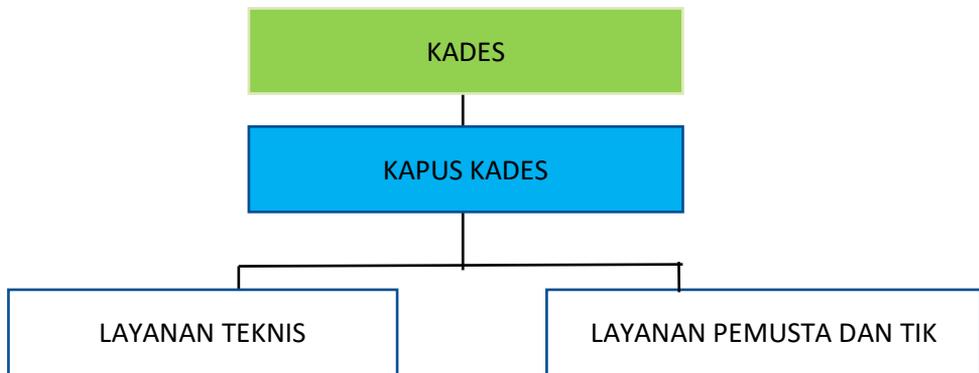
Gambar 3. Struktur Organisasi Perpustakaan Kecamatan



4. Struktur Perpustakaan Desa/Kelurahan:

- 1) Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah.
- 2) Struktur organisasi minimal serupa dengan Perpustakaan Kecamatan, terdiri dari kepala perpustakaan, bagian pelayanan teknis, dan bagian pelayanan pemustaka dan TIK. Gambar 4 berikut memberikan ilustrasi struktur organisasi ini.

Gambar 4. Struktur Organisasi Perpustakaan Desa



Secara keseluruhan, SNP Umum No. 2. Tahun 2024 memberikan panduan yang lebih terperinci dan komprehensif tentang struktur perpustakaan umum di Indonesia. Standar ini tidak hanya mengatur struktur organisasi, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan umum.

4.4.6 Jenis layanan perpustakaan umum

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 menjadi landasan hukum utama yang mengatur layanan perpustakaan umum di Indonesia. Undang-Undang ini secara eksplisit mengamanatkan penyediaan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap (Pasal 22 ayat 5). Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 merinci jenis-jenis layanan yang harus disediakan oleh perpustakaan umum, meliputi pelayanan sirkulasi (baca di tempat, peminjaman, dan pengembalian) (Pasal 25 ayat 3), pelayanan referensi (pemberian informasi, bimbingan, dan penelusuran) (Pasal 25 ayat 3), serta pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (Pasal 21 ayat 1).

Selain layanan-layanan yang disebutkan secara eksplisit, kedua peraturan tersebut juga memberikan arahan umum mengenai jenis layanan yang harus disediakan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 menekankan bahwa layanan perpustakaan harus berorientasi pada pemustaka dan dikembangkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 juga menggarisbawahi bahwa standar pelayanan perpustakaan berlaku untuk semua jenis perpustakaan (Pasal 23 ayat (2)), mengindikasikan bahwa perpustakaan umum harus menyediakan layanan yang komprehensif dan beragam.

Standar Nasional Perpustakaan Umum (SNP) Nomor 2 Tahun 2024 semakin memperkuat dan merinci jenis-jenis layanan yang harus disediakan oleh perpustakaan umum. SNP membagi layanan menjadi dua kategori utama: pelayanan teknis (pengadaan dan pengolahan bahan pustaka) dan pelayanan pemustaka. Pelayanan pemustaka meliputi pelayanan sirkulasi, referensi, baca di tempat, dan

pelayanan anak (Lampiran I, II, III, dan IV Pasal 5 ayat (3)). Perpustakaan tingkat provinsi dan kabupaten/kota wajib menyediakan pelayanan referensi, sedangkan perpustakaan tingkat kecamatan dan desa/kelurahan tidak diwajibkan.

Lebih lanjut, SNP mendorong perpustakaan umum untuk menyediakan layanan tambahan seperti layanan daring, perpustakaan keliling atau ekstensi, dan layanan khusus bagi kelompok rentan. Perpustakaan umum juga didorong untuk terus meningkatkan kualitas layanan melalui survei dan diversifikasi layanan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga menjadi aspek penting dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan umum modern.

4.4.7 Perpustakaan Umum Provinsi

Perpustakaan provinsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014, merupakan perpustakaan daerah dengan fungsi multidimensional, mencakup pembinaan, rujukan, deposit, penelitian, dan pelestarian. Keberadaannya di ibukota provinsi menjadikannya pusat informasi dan literasi yang strategis.

UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa penyediaan layanan perpustakaan umum, termasuk perpustakaan provinsi, merupakan kewajiban pemerintah daerah. Hal ini menegaskan peran krusial perpustakaan dalam mendukung pembangunan masyarakat yang berpengetahuan dan literat.

Meskipun secara ideal setiap provinsi seharusnya memiliki perpustakaan umum provinsi, data tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 38 provinsi di Indonesia, baru 34 provinsi yang telah memiliki perpustakaan umum provinsi. Beberapa provinsi bahkan memiliki lebih dari satu perpustakaan umum provinsi, seperti DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Namun, masih terdapat provinsi yang belum memiliki perpustakaan umum provinsi, seperti Provinsi Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.¹⁰⁹

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan Umum (SNP) No. 2 Tahun 2024. Pasal 5 ayat (3) SNP ini menguraikan bahwa jenis pelayanan perpustakaan terdiri dari pelayanan teknis, yang mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan, serta pelayanan pemustaka.

Standar layanan ini juga berlaku untuk perpustakaan umum tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Secara khusus, pelayanan pemustaka meliputi layanan baca di tempat, layanan sirkulasi (Pasal 5 ayat (3b)), dan layanan referensi (Pasal 5 ayat (3b)). Layanan referensi ini mencakup setidaknya pelayanan meja informasi, pelayanan bimbingan penggunaan koleksi referensi, dan pelayanan penelusuran (Pasal 5 ayat (3c)).

Selain itu, perpustakaan umum tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga diamanatkan untuk menyediakan layanan anak (Pasal 5 ayat (3b)). Untuk meningkatkan kualitas layanan, perpustakaan umum dapat mempertimbangkan layanan tambahan seperti perpustakaan keliling, internet, bimbingan pemustaka, dan

¹⁰⁹ <https://data.perpusnas.go.id/public/direktori>, diakses, 30 mei 2024

literasi informasi, meskipun layanan ini tidak diwajibkan secara eksplisit dalam SNP.

Keberadaan dan perkembangan perpustakaan umum provinsi menjadi indikator penting dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan perpustakaan di Indonesia. Diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan bahwa setiap provinsi memiliki perpustakaan umum provinsi yang memadai dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan literasi.

Berdasarkan SNP Umum No. 2. Tahun 2024 menyelenggarakan berbagai jenis layanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan literasi masyarakat. Berikut adalah uraian lebih lanjut mengenai jenis-jenis layanan tersebut:

1. Layanan Sirkulasi: Layanan ini memfasilitasi peminjaman dan pengembalian bahan pustaka, baik buku maupun materi lainnya, kepada anggota perpustakaan. Sistem manajemen sirkulasi yang efisien memastikan kelancaran proses ini.
2. Layanan Membaca di Tempat: Perpustakaan menyediakan ruang baca yang kondusif bagi pengunjung untuk membaca, belajar, atau melakukan penelitian dengan koleksi buku, majalah, dan koran yang tersedia.
3. Layanan Referensi: Layanan ini memberikan bantuan kepada pengunjung dalam menemukan informasi yang relevan melalui berbagai sumber, baik cetak maupun daring, dengan bimbingan pustakawan atau staf perpustakaan.
4. Layanan Bercerita: Layanan ini difokuskan pada anak-anak, di mana pustakawan atau sukarelawan membacakan cerita untuk meningkatkan minat baca dan literasi sejak dini.
5. Layanan Perpustakaan Keliling: Layanan ini menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap perpustakaan fisik dengan menyediakan layanan perpustakaan secara mobile di lokasi-lokasi tertentu.
6. Layanan Internet: Perpustakaan menyediakan akses internet bagi pengunjung untuk melakukan pencarian informasi online, mengakses sumber daya digital, atau melakukan aktivitas lainnya yang membutuhkan koneksi internet.
7. Layanan Penelusuran Informasi: Layanan ini membantu pengunjung dalam mencari dan menemukan informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan katalog perpustakaan, database, atau sumber informasi elektronik lainnya.
8. Layanan Bimbingan Pemustaka: Layanan ini memberikan bantuan individual atau kelompok kepada pemustaka dalam menggunakan sumber daya perpustakaan, memilih bacaan, atau merumuskan pertanyaan penelitian.
9. Layanan Literasi Informasi: Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemustaka dalam mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis melalui pelatihan atau program yang mengajarkan keterampilan penelitian, evaluasi sumber, dan kecakapan digital.

Dengan menyediakan beragam layanan tersebut, perpustakaan umum berperan penting dalam mendukung perkembangan intelektual dan literasi

masyarakat, serta memperluas akses terhadap informasi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Namun, dalam beberapa kasus, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi dapat menyediakan layanan keliling untuk membawa koleksi buku dan layanan perpustakaan ke masyarakat yang tidak dapat mengunjungi perpustakaan secara langsung. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan seperti mobil atau van perpustakaan yang dilengkapi dengan rak buku, komputer, dan layanan lainnya.

Selain itu, beberapa perpustakaan juga dapat menyediakan layanan pengiriman buku melalui pemesanan atau *delivery by order*, sehingga membantu memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan perpustakaan tanpa harus pergi ke lokasi perpustakaan.

Beberapa perpustakaan juga dapat memasang rak buku dan menyediakan layanan perpustakaan di lokasi publik yang ramai seperti pusat perbelanjaan, pasar, atau tempat keramaian lainnya untuk memudahkan akses masyarakat terhadap koleksi buku dan layanan perpustakaan.

Namun, untuk mengetahui secara pasti apakah perpustakaan di suatu daerah menyediakan layanan keliling atau layanan di tempat-tempat keramaian, perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut pada situs web resmi atau langsung menghubungi pihak perpustakaan terkait.

Penelitian mengenai anggaran yang dialokasikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah akan sangat bermanfaat untuk memahami sejauh mana pemerintah setempat memprioritaskan pembangunan perpustakaan dan meningkatkan minat baca masyarakat.

Penelitian semacam ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai anggaran yang dialokasikan oleh masing-masing Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam kurun waktu tertentu, serta penggunaan anggaran tersebut untuk meningkatkan ketersediaan bahan bacaan dan pembinaan minat baca masyarakat. Data tersebut kemudian dapat dianalisis untuk menghitung persentase anggaran yang digunakan untuk tujuan tersebut.

Selain itu, penelitian juga dapat dilakukan untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran tersebut dalam meningkatkan ketersediaan bahan bacaan dan minat baca masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai jumlah bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan dan jumlah orang yang mengunjungi perpustakaan dalam kurun waktu tertentu sebelum dan setelah penggunaan anggaran tersebut.

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi penting kepada pemerintah setempat untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan dan strategi mereka dalam meningkatkan ketersediaan bahan bacaan dan pembinaan minat baca masyarakat.

4.4.8 Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota

Keberadaan Perpustakaan Umum di setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia didasarkan pada ayat (2) dari Undang-Undang No. 43 tahun 2007, yang

menyatakan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perpustakaan umum di daerah mereka. Perpustakaan tersebut memiliki tugas utama dalam pengembangan koleksi, yaitu menyimpan bahan perpustakaan seperti karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam yang diterbitkan di daerah tersebut, atau karya tentang daerah tersebut yang ditulis oleh warga negara Indonesia dan diterbitkan baik di dalam maupun di luar negeri.

Di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia, terdapat perpustakaan umum dengan berbagai nama, seperti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Daerah, Dinas Perpustakaan, Perpustakaan Nagari, Perpustakaan Umum Daerah, Perpustakaan Kota, dan sebagainya. Meskipun ada variasi nama, semua perpustakaan ini pada dasarnya adalah representasi dari perpustakaan umum tingkat kabupaten/kota. Ada yang digabungkan dengan kearsipan dan ada juga yang berdiri sendiri.

Berdasarkan sumber dari situs data. perpusnas. go. id pada bulan mei 2023 jumlah perpustakaan kabupaten kota di seluruh Indonesia berjumlah 519, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 3. Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota

No	Provinsi	Perpustakaan Kab/Kota	Provinsi	Perpustakaan Kab/Kota
1.	DI Yogyakarta	5	Sulteng	13
2.	DKI Jakarta	6	Kalbar	14
3.	Kaltara	6	Kalteng	14
4.	Gorontalo	6	Kalsel	14
5.	Sulbar	6	Lampung	15
6.	Babel	7	Sulut	16
7.	Kepri	7	Sultra	16
8.	Banten	8	Sumsel	17
9.	Bali	9	Sumbar	20
10.	Bengkulu	10	NTT	22
11.	NTB	10	Aceh	24
12.	Kaltim	10	Sulsel	26
13.	Malut	10	Jabar	27
14.	Jambi	11	Papua	28
15.	Maluku	11	Sumut	33
16.	Riau	12	Jateng	35
17.	Papua Barat	12	Jatim	39

(Sumber: data.perpusnas.go.id/public/direktori)¹¹⁰

Perpustakaan Kabupaten/Kota memiliki ini fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2014.

4.4.9 Pemanfaatan Perpustakaan Umum Di Indonesia

Tingkat pemanfaatan perpustakaan umum menjadi indikator penting dalam mengukur relevansi dan dampaknya terhadap masyarakat. Meskipun perpustakaan umum di Indonesia terbuka untuk semua kalangan, data dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perpustakaan Nasional RI tahun 2020 (Indonesia, 2020) menunjukkan bahwa pemanfaatan perpustakaan belum menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam mencari informasi.

Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kesadaran masyarakat akan pentingnya perpustakaan sebagai sumber energi intelektual dengan kebiasaan mereka dalam memanfaatkan perpustakaan secara rutin. Meskipun masyarakat terdidik mengakui nilai perpustakaan, budaya literasi yang kuat dalam

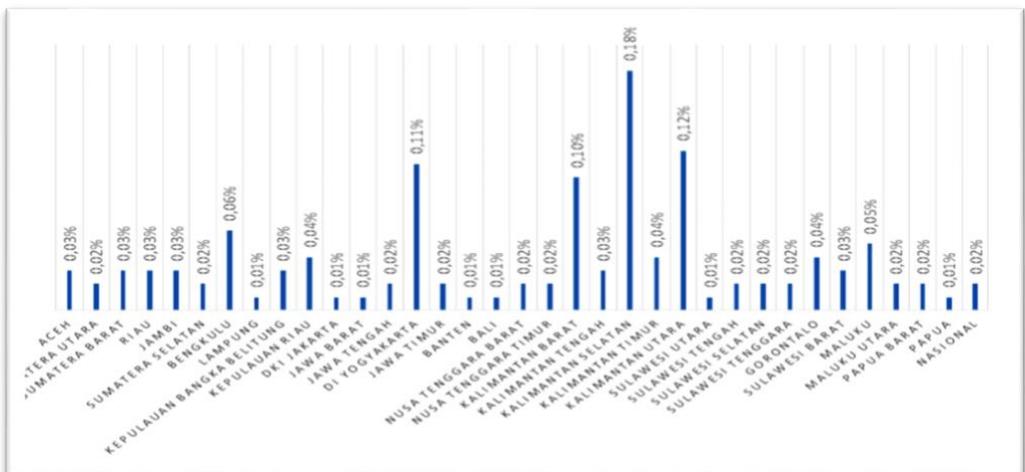
¹¹⁰ <https://data.perpusnas.go.id/public/direktori>, diakses 30 mei 2024

menghargai dan memanfaatkan perpustakaan belum sepenuhnya tertanam dalam masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan literasi informasi dan budaya membaca di Indonesia perlu terus digalakkan. Perpustakaan umum perlu mengembangkan strategi inovatif dan relevan untuk menarik minat masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui penyelenggaraan program-program yang menarik dan interaktif, penyediaan koleksi yang beragam dan mutakhir, serta penciptaan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Selain itu, kolaborasi strategis antara perpustakaan umum, lembaga pendidikan, dan pemerintah menjadi kunci dalam meningkatkan pemanfaatan perpustakaan dan membangun budaya literasi yang kuat di Indonesia.

Data dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perpustakaan Nasional RI tahun 2020 (Indonesia,2020) menunjukkan bahwa meskipun perpustakaan umum di Indonesia terbuka untuk semua kalangan, tingkat pemanfaatannya belum optimal. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kesadaran masyarakat akan pentingnya perpustakaan dengan kebiasaan mereka dalam memanfaatkannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif untuk menjembatani kesenjangan ini dan mendorong pemanfaatan perpustakaan yang lebih luas di seluruh lapisan masyarakat. (Indonesia,P. N. R. (2020)¹¹¹ sebagai gambaran maka penulis sajikan grafis berikut ini

Gambar 5 Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan secara Nasional



(Sumber: Laporan kinerja instansi pemerintah Perpustakaan Nasional RI tahun 2020, h. 25)

Setelah melakukan analisis terhadap data dan informasi yang ada, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemanfaatan perpustakaan di Indonesia masih rendah.

¹¹¹ Indonesia,P.N.R. (2020). Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024. no. Agustus, 2020.h.24-25

Kunjungan pemustaka di perpustakaan mencerminkan tingkat pemanfaatan, yang dapat diukur dengan membagi jumlah kunjungan pemustaka per hari dengan jumlah penduduk.

Berdasarkan hasil sensus 2018, tingkat pemanfaatan perpustakaan di Indonesia saat ini baru mencapai 0,02%. Angka ini masih jauh dari angka ideal yang ditetapkan oleh Standar Nasional Perpustakaan, yang menyatakan bahwa jumlah kunjungan ke perpustakaan umum tiap hari seharusnya mencapai 2% dari jumlah penduduk di suatu wilayah. Dalam grafik tingkat pemanfaatan perpustakaan yang diberikan, terlihat bahwa terdapat lima provinsi yang memiliki tingkat pemanfaatan perpustakaan tertinggi. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tingkat pemanfaatan sebesar 0,18%, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Utara dengan 0,12%, Provinsi DI Yogyakarta dengan 0,11%, Provinsi Kalimantan Barat dengan 0,10%, dan Provinsi Bengkulu dengan 0,06%. Sementara itu, provinsi-provinsi lainnya memiliki tingkat pemanfaatan perpustakaan di bawah 0,05%.¹¹²

Untuk meningkatkan tingkat pemanfaatan perpustakaan di seluruh Indonesia, diperlukan upaya untuk mempromosikan pentingnya membaca dan mengakses sumber daya di perpustakaan. Dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan juga sangat diperlukan guna menciptakan budaya literasi yang lebih baik.

Namun, ada beberapa kekurangan yang perlu kita acari tahu. Pertama, tidak ada penjelasan yang memadai tentang penyebab rendahnya tingkat pemanfaatan perpustakaan. Mengapa orang-orang tidak memanfaatkan perpustakaan dengan baik? Apakah ada kendala akses, kurangnya kesadaran, atau faktor lain yang mempengaruhi? Informasi tambahan tentang faktor-faktor ini akan membantu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Analisis mengenai rendahnya tingkat pemanfaatan perpustakaan di Indonesia tidak cukup hanya dengan jargon umum seperti "perlu dilakukan upaya untuk mempromosikan pentingnya membaca dan mengakses sumber daya di perpustakaan" serta "dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan sangat diperlukan." Kita perlu memahami alasan di balik rendahnya minat baca dan memformulasikan langkah-langkah yang lebih konkret.

Studi kasus Amerika Serikat yang dilakukan oleh Zickuhr, Rainie, dan Purcell (2013a) menunjukkan bahwa perpustakaan umum telah menjadi bagian integral dari keseharian masyarakat dan terhubung dengan berbagai aspek kehidupan. Perpustakaan dilihat sebagai sumber daya dan jejaring yang bernilai, dan hubungan yang lebih terjalin ketika perpustakaan menjadi relevan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti saat memiliki anak, mencari pekerjaan, atau

¹¹² Indonesia, P.N.R. (2020). Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024. *no. Agustus, 2020*.h.24-25

menjadi mahasiswa. (hal. 2)¹¹³. Studi Pew 2014 mengklasifikasikan pengguna perpustakaan ke dalam beberapa kelompok, mulai dari yang sangat terlibat hingga yang tidak terlibat sama sekali. Studi ini menemukan bahwa 30% pengguna perpustakaan sangat terlibat, sementara 40% lebih terlibat secara moderat. Pengguna perpustakaan yang terlibat juga terhubung dengan sumber daya sosial, teknologi, dan budaya lainnya di komunitas mereka. (Pew Research Center 2014)¹¹⁴.

Berdasarkan temuan tersebut, berikut adalah beberapa langkah konkret yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pemanfaatan perpustakaan di Indonesia:

1. Permudah Akses dan Tingkatkan Pengalaman Pengguna: Perpustakaan perlu memastikan kemudahan akses fisik maupun digital. Jam operasional yang lebih fleksibel, lokasi strategis, dan koleksi daring yang lengkap dapat meningkatkan daya tarik perpustakaan.
2. Ragamkan Koleksi dan Program: Selain menyediakan bahan bacaan cetak, perpustakaan dapat menawarkan koleksi digital, ruang kreativitas, dan program menarik seperti diskusi bedah buku, temu penulis, atau lokakarya keterampilan. Kolaborasi dengan komunitas lokal juga dapat memperkaya program perpustakaan.
3. Jalin Keterlibatan Masyarakat: Perpustakaan harus aktif menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar. Program literasi dini, *outreach program* ke sekolah-sekolah, atau layanan perpustakaan keliling dapat menjadi jembatan untuk mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat.
4. Manfaatkan Teknologi: Perpustakaan dapat memanfaatkan teknologi untuk mempermudah akses informasi dan layanan. Pengembangan website dan aplikasi perpustakaan, serta promosi melalui media sosial, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan dan program perpustakaan.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara holistik, perpustakaan di Indonesia dapat berevolusi menjadi pusat belajar dan pengembangan masyarakat yang inklusif dan relevan di era digital.

Selain kita mengetahui kekurangan maka akan dapat dibuat saran konkret atau langkah-langkah yang diusulkan untuk meningkatkan tingkat pemanfaatan perpustakaan. Kita perlu mendalami jargon "perlu dilakukan upaya untuk mempromosikan pentingnya membaca dan mengakses sumber daya di perpustakaan" serta "dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan sangat diperlukan. "

Berbeda dengan masyarakat maju, Amerika Serikat telah mengintegrasikan perpustakaan secara kompleks ke dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti yang

¹¹³ Zickuhr, K., Rainie, L., & Purcell, K. (2013). Library Services in the Digital Age. Retrieved from <http://libraries.pewInternet.org/2013/01/22/Libraryservices>

¹¹⁴ Pew Research Center. (2014, March). From Distant Admirers to Library Lovers—and Beyond: A Typology of Public Library Engagement in America. Retrieved from <http://libraries.pewInternet.org/2014/03/13/typology>

diamati oleh Zickuhr, Rainie, dan Purcell (2013), "Hubungan orang Amerika dengan perpustakaan umum adalah bagian dari informasi dan lanskap sosial mereka yang lebih luas, karena orang-orang yang memiliki sumber daya ekonomi, sosial, teknologi, dan budaya yang luas juga lebih cenderung menggunakan dan menghargai perpustakaan sebagai bagian dari jaringan tersebut. Hubungan yang lebih dalam dengan perpustakaan umum juga sering dikaitkan dengan momen-momen penting dalam hidup seperti memiliki anak, mencari pekerjaan, menjadi mahasiswa, dan melalui situasi di mana penelitian dan data dapat membantu menginformasikan keputusan" (hal. 2) ¹¹⁵.

Keterlibatan yang lebih mendalam dengan perpustakaan sering kali dikaitkan dengan momen-momen penting dalam hidup, seperti memiliki anak, mencari pekerjaan, atau menjadi mahasiswa (Zickuhr et al., 2013). Studi Pew Research Center pada tahun 2014 mengategorikan pengguna perpustakaan mulai dari yang sangat terlibat ("pencinta perpustakaan" dan "pemakan informasi") hingga yang tidak terlibat ("pengagum jauh" dan "di luar jaringan"). Hasilnya, 30% pengguna perpustakaan sangat terlibat, sementara 40% terlibat secara moderat. Pengguna yang terlibat juga terhubung dengan sumber daya sosial, teknologi, dan budaya lainnya di komunitas mereka. ¹¹⁶

Meskipun sirkulasi perpustakaan mengalami penurunan, perpustakaan tetap menjadi pusat aktivitas yang ramai. Pada tahun 2017, tercatat 1,32 miliar kunjungan ke perpustakaan umum dengan 2,16 miliar item diedarkan (IMLS 2019a¹¹⁷, 2019b)¹¹⁸. Selain itu, perpustakaan umum juga memfasilitasi 240 juta transaksi referensi, menawarkan lebih dari 5,4 juta program yang dihadiri oleh 118 juta orang, dan menyediakan 300.000 komputer akses publik yang digunakan dalam 257 juta sesi (IMLS, 2019a).

Studi Horrigan (2016) mengungkapkan bahwa pengguna perpustakaan umum yang paling sering adalah wanita dan individu berusia 16-29 tahun, sedangkan non-pengguna cenderung berjenis kelamin laki-laki dengan tingkat pendidikan formal yang lebih rendah. Orang tua juga merupakan pengguna aktif perpustakaan, terutama untuk materi anak-anak yang sirkulasinya tetap stabil sejak 2010¹¹⁹. Meskipun individu berpenghasilan rendah cenderung jarang menggunakan

¹¹⁵ Zickuhr, K., Rainie, L., & Purcell, K. (2013). Library Services in the Digital Age. Retrieved from <http://libraries.pewInternet.org/2013/01/22/Libraryservices>

¹¹⁶ Pew Research Center. (2014, March). From Distant Admirers to Library Lovers—and Beyond: A Typology of Public Library Engagement in America. Retrieved from <http://libraries.pewInternet.org/2014/03/13/typology>

¹¹⁷ IMLS (Institute of Museum and Library Services). (2019a). Public Libraries in the United States: Fiscal Year 2016. Washington, DC: IMLS.

¹¹⁸ IMLS (Institute of Museum and Library Services). (2019b). Public Libraries Survey: Fiscal Year 2017; Supplementary Tables. Retrieved from https://www.imls.gov/sites/default/files/fy2017_pls_tables.pdf

¹¹⁹ Horrigan, J. B. (2016). Libraries 2016. Pew Research Center. Retrieved from <http://www.pewinternet.org/2016/09/09/2016/Libraries-2016>

perpustakaan, 50% dari mereka yang berpenghasilan rumah tangga \$30.000 atau kurang tetap mengunjungi perpustakaan dalam 12 bulan terakhir.

Pemanfaatan layanan perpustakaan juga beragam, mulai dari meminjam buku, membaca, belajar, hingga mencari pekerjaan dan mengakses internet (Horrigan, 2016)¹²⁰. Teknologi perpustakaan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk tugas sekolah, komunikasi, informasi kesehatan, dan kelas online. Selain itu, katalog dan alat digital perpustakaan dimanfaatkan untuk mencari sumber informasi, menyimpan bahan, melakukan penelitian, dan mengakses database online.

Pertanyaannya, bagaimana dengan pemanfaatan perpustakaan umum di Indonesia, khususnya dalam hal penggunaan jaringan internet? Meskipun dapat diasumsikan bahwa masyarakat memanfaatkan jaringan internet yang tersedia di perpustakaan, data kuantitatif mengenai jumlah pengguna harian, mingguan, bulanan, atau tahunan masih perlu diinvestigasi lebih lanjut.

4.4.10 Sikap Terhadap Perpustakaan Umum

Memahami sikap individu terhadap perpustakaan umum sangat penting bagi manajer perpustakaan karena beberapa alasan. Pertama, dengan memahami sikap ini, manajer dapat menilai tingkat kepuasan pengguna sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi harapan pengguna secara efektif (Kluke, 2021)¹²¹. Sikap masyarakat juga membantu dalam menentukan kebutuhan spesifik populasi, terutama terkait bahan bacaan dan informasi yang relevan, memungkinkan manajer untuk menyesuaikan koleksi perpustakaan dengan kebutuhan tersebut (Veil & Bishop, 2013)¹²². Sikap positif terhadap perpustakaan juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, karena individu dengan pandangan yang positif cenderung lebih terlibat dalam layanan dan program perpustakaan (Mugwisi et al., 2016).¹²³

Selain itu, sikap masyarakat terhadap perpustakaan umum berperan penting dalam mempertahankan dukungan eksternal dari entitas seperti pemerintah, sponsor, atau donor. Persepsi positif masyarakat terhadap perpustakaan dapat memperkuat argumen untuk mendapatkan dukungan dan pendanaan yang diperlukan (Mansour, 2019). Sikap masyarakat juga membantu dalam mengevaluasi efektivitas program dan inisiatif perpustakaan, karena umpan balik dari pengguna membantu manajer

¹²⁰ Horrigan, J. B. (2016). *Libraries 2016*. *Ibid.*

¹²¹ Kluke, J. (2021). *The Greatest Good Place: The role of the public library in the development of successful cities, and the relationship between public library contributions and planning policy* (Doctoral dissertation, Toronto Metropolitan University).

¹²² Veil, S. R., & Bishop, B. W. (2014). Opportunities and challenges for public libraries to enhance community resilience. *Risk analysis*, 34(4), 721-734.

¹²³ Mugwisi, T., Jiyane, G. V., & Fombad, M. C. (2018). Public libraries as facilitators of information services: A case study of selected libraries in KwaZulu-Natal. *Information development*, 34(1), 31-43.

menilai keberhasilan program yang diterapkan dan melakukan perbaikan yang diperlukan (Karki et al. , 2022).

Studi kasus Perpustakaan umum Amerika Serikat terus mendapatkan apresiasi yang tinggi di Amerika Serikat, terbukti dari hasil survei Pew Research Center tahun 2016. Sebagian besar orang Amerika (77%) merasa perpustakaan menyediakan sumber daya yang mereka butuhkan, dengan persentase lebih tinggi (84%) di kalangan kaum muda (usia 16-29 tahun). Masyarakat menghargai perpustakaan karena menyediakan kesempatan pendidikan, tempat yang aman, dan mendorong kreativitas. Mayoritas responden (66%) percaya bahwa penutupan perpustakaan umum akan berdampak besar pada komunitas mereka. Persepsi ini lebih kuat di kalangan wanita, individu berusia 50-64 tahun, lulusan perguruan tinggi, dan orang Latin. Dampak penutupan perpustakaan juga dirasakan lebih kuat oleh orang Latin, individu berusia 50-64 tahun, mereka yang berpenghasilan rendah, dan mereka yang memiliki anak kecil.¹²⁴

Studi OCLC/ALA 2018 terhadap pemilih menegaskan pandangan positif masyarakat mengenai peran penting perpustakaan umum dalam komunitas. Lebih dari separuh responden (55%) menganggap perpustakaan umum sebagai lembaga lokal yang esensial dan sumber kebanggaan komunitas (53%). Selain itu, perpustakaan umum juga dipandang sebagai penggerak kemajuan pendidikan (58%) dan peningkat kualitas hidup komunitas (51%).¹²⁵

Di era digital ini, perpustakaan umum tetap dianggap sebagai sumber daya komunitas yang tak ternilai (49%), tempat berkumpul (44%), dan pusat komunitas (30%). Masyarakat juga menghargai perpustakaan yang menawarkan kegiatan-kegiatan unik dan memperkaya yang tidak dapat ditemukan di tempat lain (48%).

Beberapa layanan perpustakaan yang paling dihargai oleh masyarakat antara lain tersedianya area tenang untuk bekerja atau belajar (67%), akses gratis ke buku dan teknologi (66%), lokasi yang mudah dijangkau (66%), akses gratis ke komputer dan internet (65%), koleksi materi yang beragam (65%), dan penyediaan Wi-Fi (65%). (OCLC/ALA 2018, 6)

Studi OCLC/ALA (2018) menunjukkan bahwa penggunaan perpustakaan umum terjadi baik secara fisik maupun digital. Pada tahun sebelumnya, 70% responden mengunjungi perpustakaan rata-rata 8,6 kali, sementara 52% mengakses situs web perpustakaan mereka beberapa kali. Lebih dari separuh responden (56%) menganggap penting kemampuan mengunduh materi melalui situs web perpustakaan, dan 33% menghadiri program atau acara perpustakaan dalam enam bulan terakhir.

¹²⁴ Horrigan, J. B. (2016, September 9). Americans' Attitudes Toward Public Libraries. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/internet/2016/09/09/americans-attitudes-toward-public-libraries/>

¹²⁵ OCLC/ALA. (2018). *From Awareness to Funding: Voter Perceptions and Support of Public Libraries in 2018*. Dublin, OH: OCLC. <https://doi.org/1025333/C3M92S>

Namun, studi ini juga mengungkapkan beberapa tren yang kurang menggemirakan. Meskipun mayoritas responden masih mengasosiasikan perpustakaan dengan layanan penting, persentasenya lebih rendah dibandingkan tahun 2008. Terjadi penurunan penggunaan beberapa layanan dasar, seperti buku fiksi dan nonfiksi, DVD, serta materi referensi cetak. Penurunan ini juga terlihat pada layanan anak-anak, dengan lebih sedikit responden yang menganggap perpustakaan sebagai sumber penting untuk membantu pekerjaan rumah atau mempersiapkan anak-anak untuk sekolah.

Meskipun demikian, perpustakaan umum tetap dipandang sebagai pusat komunitas dan pembelajaran sepanjang hayat, terutama bagi imigran dan non-penutur bahasa Inggris. Dukungan terhadap penyediaan layanan teknologi dan internet juga terus meningkat. Penelitian Geiger (2017) juga menunjukkan bahwa sebagian besar individu masih mengandalkan perpustakaan umum sebagai sumber informasi terpercaya dan sarana pembelajaran, terutama di kalangan orang dewasa kulit hitam dan Latin.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa perpustakaan umum tetap relevan dan penting bagi masyarakat, namun perlu terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan preferensi pengguna.

Pelajaran yang dapat diambil untuk perpustakaan umum di Indonesia berdasarkan teks di atas adalah:

1. Pentingnya Memahami Persepsi Pengguna: Perpustakaan umum di Indonesia perlu secara aktif mengukur dan memahami persepsi pengguna terhadap layanan mereka. Survei dan studi dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan layanan perpustakaan, serta kebutuhan dan harapan pengguna.
2. Menjaga Relevansi di Era Digital: Meskipun perpustakaan umum dihargai, terdapat penurunan penggunaan beberapa layanan dasar. Perpustakaan di Indonesia perlu beradaptasi dengan era digital dengan menyediakan akses internet, koleksi digital, dan layanan online yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Menargetkan Layanan untuk Kelompok Tertentu: Perpustakaan umum perlu memperhatikan kebutuhan spesifik dari berbagai kelompok pengguna, seperti wanita, lansia, lulusan perguruan tinggi, dan kelompok minoritas. Layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok dapat meningkatkan relevansi dan penggunaan perpustakaan.
4. Menunjukkan Dampak Positif pada Komunitas: Perpustakaan umum perlu secara aktif mengkomunikasikan dampak positif mereka pada komunitas, baik dalam hal pendidikan, pengembangan keterampilan, maupun peningkatan kualitas hidup. Hal ini dapat membantu meningkatkan dukungan dan pendanaan dari pemerintah dan masyarakat.
5. Menjadi Pusat Komunitas: Perpustakaan umum dapat berperan sebagai pusat komunitas yang menyediakan ruang bagi berbagai kegiatan dan interaksi sosial. Dengan menyediakan layanan yang beragam dan relevan,

perpustakaan dapat menjadi tempat yang menarik bagi masyarakat dari berbagai latar belakang.

6. Menyediakan Akses Informasi yang Terpercaya: Perpustakaan umum memiliki peran penting dalam menyediakan akses informasi yang terpercaya dan akurat, terutama di era informasi yang penuh dengan berita palsu dan disinformasi.
7. Berkolaborasi dengan Pemangku Kepentingan: Perpustakaan umum perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, sekolah, komunitas, dan organisasi nirlaba, untuk meningkatkan jangkauan dan dampak layanan mereka.

Dengan menerapkan pelajaran-pelajaran ini, perpustakaan umum di Indonesia dapat meningkatkan kualitas layanan mereka, memperluas jangkauan, dan memperkuat peran mereka sebagai lembaga penting dalam masyarakat.

4. Peran Aktif dalam Open Science: PDDI LIPI dapat berperan aktif dalam gerakan *open science* dengan menyediakan akses terbuka terhadap data penelitian dan mempromosikan praktik penelitian terbuka.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi: PDDI LIPI dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi layanan, memperluas jangkauan, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Dalam konteks pandemi, PDDI LIPI telah berhasil memanfaatkan teknologi untuk tetap memberikan layanan kepada pengguna melalui berbagai platform daring (Rizzal Rosiyan & Maha, 2020).

Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada, PDDI LIPI memiliki landasan yang kuat untuk terus berinovasi dan meningkatkan layanannya agar tetap relevan dan bermanfaat bagi pengguna di era digital. Tantangan seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dapat diatasi dengan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun lembaga penelitian lainnya. Kolaborasi ini tidak hanya akan memperluas akses terhadap sumber daya, tetapi juga memperkaya perspektif dan keahlian yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan layanan yang lebih inovatif dan relevan.

PDDI LIPI juga perlu terus mengembangkan kompetensi pustakawan dan stafnya agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan tren terkini dalam pengelolaan informasi ilmiah. Pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan akan memastikan bahwa PDDI LIPI memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Selain itu, PDDI LIPI dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara optimal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanannya. Pengembangan platform digital yang terintegrasi, seperti sistem pencarian yang canggih, repositori data penelitian yang mudah diakses, dan layanan referensi online yang responsif, akan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi ilmiah.

Dengan terus berinovasi dan meningkatkan layanannya, PDDI LIPI dapat memperkuat posisinya sebagai pusat informasi ilmiah terkemuka di Indonesia, memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendukung terciptanya masyarakat yang lebih berpengetahuan dan inovatif.

BIODATA PENULIS



Dr. Jamridafrizal, S.Ag., S.S., M.Hum. adalah seorang dosen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Beliau memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang ilmu perpustakaan, teknologi pendidikan, dan pendidikan agama Islam, dengan gelar S3 dari Universitas Negeri Jakarta, S2 dari Universitas Indonesia, dan S1 ganda dari IAIN Imam Bonjol Padang dan Universitas Indonesia.

Penulis aktif terlibat dalam organisasi profesi perpustakaan, termasuk Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Penulis pernah menjabat sebagai Ketua IPI Provinsi Banten dan anggota Dewan Perpustakaan Provinsi Banten. Karya ilmiahnya mencakup berbagai topik terkait perpustakaan dan teknologi pendidikan, dengan publikasi di jurnal internasional dan nasional.

Selain mengajar, Jamridafrizal aktif sebagai narasumber dan moderator dalam berbagai seminar dan lokakarya tingkat nasional dan provinsi. Penulis juga menjadi juri dalam pemilihan pustakawan berprestasi dan lomba perpustakaan sekolah. Kontribusinya dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi Islam sangat signifikan, terutama di Provinsi Banten.



Zulfitri, S.Ag., MA adalah seorang pustakawan ahli madya di UPT Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Beliau memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang ilmu perpustakaan dan tafsir hadis, dengan gelar S2 dari IAIN Imam Bonjol Padang dan sedang menempuh pendidikan S3 di UIN Imam Bonjol Padang.

Zulfitri aktif terlibat dalam organisasi profesi pustakawan, termasuk Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), FPPTI Sumatera Barat, dan APPTIS. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan saat ini menjabat sebagai Koordinator Layanan Referensi. Zulfitri juga aktif sebagai tim penilai dalam lomba pustakawan dan perpustakaan tingkat Sumatera Barat.

Selain bekerja sebagai pustakawan, Zulfitri juga memiliki pengalaman sebagai pengajar dan dosen luar biasa di IAIN Imam Bonjol Padang. Kontribusinya dalam bidang perpustakaan dan keilmuan Islam sangat signifikan, terutama di Sumatera Barat



Muhammad Farid Wajdi, S.Si, S.IPI, M.Hum adalah dosen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penulis menyelesaikan Pendidikan S2 Ilmu Perpustakaan di Universitas Indonesia. Pendidikan S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Yarsi Jakarta dan Fisika Universitas Indonesia.

Penulis aktif terlibat dalam organisasi profesi perpustakaan. Penulis pernah menjadi pengurus Ikatan Pustakawan Provinsi Banten dan anggota Dewan Perpustakaan Provinsi Banten, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Provinsi Banten serta aktif sebagai pengurus Asosisasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam (APPTIS).